

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini banyak mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan. Mulai dari syarat kelulusan siswa, perubahan kurikulum yang terus-menerus, biaya pendidikan yang mahal, dan lain sebagainya. Salah satu *issue* menarik dari dunia pendidikan akhir-akhir ini adalah tentang sertifikasi guru. *Issue* ini juga tidak lepas dari sorotan dan kritikan masyarakat Indonesia yang kita tahu semakin hari semakin kritis terhadap berbagai hal.

Apabila kita perhatikan, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat pendidik di Indonesia akhir-akhir ini adalah banyaknya guru yang sibuk mengurus masalah sertifikasi. Beberapa guru menyatakan bahwa mereka mengalami kelelahan fisik dan pikiran ketika mengurus sertifikasi. Hal ini disebabkan upaya mereka yang terlampau keras untuk memenuhi semua persyaratan perolehan sertifikat atas profesi mereka.

Sertifikasi guru yang merupakan perwujudan dari UU No.14 Tahun 2005 dan PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Harapan yang terkandung dalam persyaratan sertifikasi bagi guru ini sangatlah tinggi. Dengan peningkatan mutu tenaga pendidik diharapkan berimbas pada mutu anak didik, mutu pendidikan nasional, dan secara umum adalah mutu bangsa Indonesia seluruhnya.

Pada tanggal 30 Desember 2005, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan oleh DPR bersama Presiden. UU tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Pada UU ini dijelaskan pengertian yang berkaitan dengan guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Dalam Panduan Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Mendiknas, target guru yang harus mengikuti program sertifikasi adalah guru-guru bergelar S1 atau D4. Guru-guru tersebut berhak untuk menjalani proses sertifikasi dengan tahapan, yaitu menyerahkan berkas-berkas terkait dalam uji portfolio. Jika seorang guru lulus uji ini, maka dia berhak memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, maka diberi kesempatan memperbaiki portfolio, dan jika dalam uji yang kedua pun gagal, guru harus mengikuti Diklat Profesi Guru dengan kelulusan berdasarkan hasil ujian akhir. Jika guru berhasil lulus dalam ujian akhir Diklat, maka dirinya berhak atas sertifikat pendidikan. Bagi yang tidak lulus ujian Diklat dapat mengulanginya sebanyak 2 kali ujian, dan seandainya tetap tidak lulus, maka kasusnya dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Mengiringi kebijakan sertifikasi ini, Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru yang bersertifikat. Tidak tanggung-tanggung, janji pemerintah adalah kenaikan gaji bagi guru bersertifikat sebesar satu kali gaji pokok. Mendengar janji itu, semua orang terkesima bahkan setengah tidak percaya. Beberapa orang juga melontarkan kritiknya.

Di antara sorotan dan kritikan masyarakat tentang sertifikasi, kita perlu bertanya bagaimana peran guru bersertifikat di berbagai bidang kehidupan khususnya di dalam peran sosial mereka di tengah masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, budaya masyarakat di Indonesia masih berharap besar pada peran guru di tengah masyarakat. Guru yang dalam falsafah Jawa disebut "*digugu lan ditiru*" (menjadi panutan), ditempatkan sebagai sosok yang akan diikuti semua kata-katanya dan ditirukan atau menjadi teladan bagi anak didik dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar profesi pekerjaan. Ini merupakan suatu kepercayaan yang kadang dirasakan sebagai beban oleh sebagian orang. Namun, ada beberapa guru juga yang tidak mau tahu dengan label yang telah ditempelkan oleh masyarakat kepada dirinya sehingga perilaku mereka justru mempermalukan korps.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tertulis di dalam pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi sosial itu merupakan potensi guru untuk berperan di tengah lingkungan masyarakat.

Sertifikasi guru telah menempatkan guru dalam posisi yang semakin "tinggi" lagi dalam kehidupan sosial. Masyarakat berharap ada perbedaan nyata antara guru yang bersertifikat dengan guru yang belum memegang

sertifikat. Menanggapi hal ini, sikap guru tidak boleh merasa terbebani atau justru tidak mau tahu sama sekali. Harapan masyarakat tersebut harus disikapi secara profesional, disesuaikan dengan sertifikat yang dimiliki. Harus ada peningkatan kualitas dalam peran sosial guru bersertifikat di tengah masyarakat.

Peran sosial yang dimaksud di sini adalah kehidupan sosial guru untuk bergaul di tengah masyarakat, serta peran guru untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian masalah sosial yang ada di lingkungannya. Beberapa jenis masalah sosial yang dapat disebutkan di sini adalah masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan, *multi-etnis*, tradisi, pelacuran, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak jenis masalah sosial di negeri ini, kita dapat mengelompokkan ada 4 faktor masalah sosial yang terjadi, yaitu:

1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan dan pengangguran.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, sex pra nikah, narkoba, dan SARA.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dan wabah penyakit.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf dan aliran sesat.

Masalah sosial memang sangat kompleks. Guru bersertifikat sebagai orang kepercayaan masyarakat luas harus ambil bagian dalam penanganan masalah sosial ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula harapan masyarakat terhadap peran sosial guru bersertifikat di Kabupaten Klaten.

Masalah sosial di Kabupaten Klaten saat ini lebih banyak disebabkan karena peristiwa bencana alam gempa bumi yang melanda Klaten pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa tersebut menimbulkan peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten karena banyak orang tiba-tiba kehilangan tempat tinggal, banyak orang yang tergoncang mentalnya, dan banyak orang dewasa dan anak-anak yang mengalami trauma.

Peran sosial guru bersertifikat di Kabupaten Klaten sudah seharusnya dapat menyentuh masalah sosial pasca bencana gempa. Karena, sekalipun peristiwa tersebut terjadi sudah lewat masa 2 tahun bahkan hampir 3 tahun, namun masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Di sinilah peran sosial guru bersertifikat diuji. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah: *Peran Sosial Guru Bersertifikat Pendidik (Studi Situs di SMA Muhammadiyah I Klaten)*.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ditekankan pada hal-hal yang berkenaan dengan peran sosial guru bersertifikat pendidik di SMA Muhammadiyah I Klaten, khususnya di lingkungan sekolah. Fokus penelitian ini kemudian dijabarkan dalam tiga sub fokus sebagai berikut:

1. Peran sosial guru SMA Muhammadiyah I Klaten yang bersertifikat pendidik dengan Kepala Sekolah.
2. Peran sosial guru SMA Muhammadiyah I Klaten yang bersertifikat pendidik dengan rekan guru.

3. Peran sosial guru SMA Muhammadiyah I Klaten yang bersertifikat pendidik dengan siswa.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sub fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran sosial guru SMA Muhammadiyah I Klaten yang bersertifikat pendidik dengan Kepala Sekolah.
2. Mendeskripsikan peran sosial guru SMA Muhammadiyah I Klaten yang bersertifikat pendidik dengan rekan guru.
3. Mendeskripsikan peran sosial guru SMA Muhammadiyah I Klaten yang bersertifikat pendidik dengan siswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi:

1. Guru di SMA Muhammadiyah Klaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran sosial guru di lingkungan sekolah.

2. Dunia pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang dimiliki khususnya peran sosial guru di lingkungan sekolah.

3. Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti-peneliti lain di masa yang akan datang.

E. Daftar Istilah

1. Kompetensi sosial guru : kemampuan dalam pribadi seorang guru sebagai bagian dari masyarakat, baik masyarakat di lingkungan sekolah maupun masyarakat di luar sekolah, untuk bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
2. Peran sosial guru : peran yang dimainkan seorang guru dalam lingkungan sosialnya. Peran ini adalah merupakan tuntutan dari masyarakat baik masyarakat di lingkungan sekolah maupun masyarakat di luar sekolah, terhadap guru untuk memberikan sumbangan sosial dalam rangka menjaga keutuhan sosial dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat. Peran sosial guru adalah wujud nyata dari kompetensi sosial yang terkandung dalam profil seorang guru.